

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dr.Tris Dina Susanti, S.Sos.,M.Si



ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dr.Tris Dina Susanti, S.Sos., M.Si.



ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Penulis:

Dr.Tris Dina Susanti, S.Sos., M.Si.

Editor:

Atef Fahrudin, S.I.Kom.,M.I.Kom.

Adi Junadi, S.I.Kom.,M.I.Kom.

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Mei 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
; 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-448-872-2

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Administrasi Pembangunan" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik dan bagi para praktisi dan pemerhati administrasi pembangunan.

Administrasi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu administrasi publik yang fokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam era globalisasi dan desentralisasi seperti sekarang ini, peran administrasi pembangunan menjadi semakin penting dalam mendorong pembangunan nasional yang berkualitas dan berkeadilan.

Buku ini terdiri dari 10 bab yang membahas berbagai aspek administrasi pembangunan, mulai dari konsep dasar, teori, dan ruang lingkup administrasi pembangunan hingga isu-isu kontemporer seperti pembangunan berkelanjutan, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pembangunan. Setiap bab dilengkapi dengan contoh kasus, dan referensi terbaru untuk memperkaya wawasan dan pemahaman pembaca.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu administrasi pembangunan di Indonesia.

Majalengka, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB 1: PENGANTAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.....	4
1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan ..	4
1.2 Sejarah Perkembangan Administrasi Pembangunan	9
1.3 Peran Administrasi Publik dalam Pembangunan	14
1.4 Tantangan Administrasi Pembangunan di Era Globalisasi	16
BAB 2: TEORI DAN KONSEP PEMBANGUNAN	20
2.1 Teori Pembangunan Klasik dan Modern	20
2.2 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan	29
2.3 Konsep Pembangunan Inklusif	30
2.4 Indikator Keberhasilan Pembangunan	32
BAB 3: PERENCANAAN PEMBANGUNAN	34
3.1 Definisi dan Prinsip Perencanaan Pembangunan	34
3.2 Jenis dan Tahapan Perencanaan Pembangunan	38
3.3 Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan	42
3.4 Instrumen Perencanaan Pembangunan Daerah	46
BAB 4: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	51
4.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	51
4.2 Model Implementasi Kebijakan Pembangunan	53
4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	54
4.4 Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pembangunan	56
BAB 5: MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN.....	58
5.1 Definisi dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi	58
5.2 Jenis dan Metode Monitoring dan Evaluasi.....	60
5.3 Indikator Kinerja Pembangunan.....	62
5.4 Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi	64
BAB 6: PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	67

6.1	Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan	67
6.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	69
6.3	Peran Investasi dalam Pembangunan	71
6.4	Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public-Private Partnership)	72
BAB 7: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA		75
7.1	Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia	75
7.2	Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	77
7.3	Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Pembangunan ...	78
7.4	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah.....	80
BAB 8: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR		83
8.1	Definisi dan Jenis Infrastruktur	83
8.2	Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Ekonomi	87
8.3	Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia	89
8.4	Strategi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.....	90
BAB 9: PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH		96
9.1	Konsep dan Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.....	96
9.2	Potensi dan Keunggulan Daerah	98
9.3	Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal.....	100
9.4	Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Pembangunan Daerah	103
BAB 10: TANTANGAN DAN ARAH PEMBANGUNAN MASA DEPAN		109
10.1	Tantangan Pembangunan di Era Revolusi Industri 4.0...	109
10.2	Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim.....	114
10.3	Inovasi dan Teknologi dalam Pembangunan	119
10.4	Visi dan Arah Pembangunan Indonesia Masa Depan	123

BAB 1

PENGANTAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



Gambar 1 Ilustrasi Pembangunan

1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan cabang ilmu administrasi yang fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Menurut (Siagian, 2014), administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang

dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir. Administrasi pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup administrasi pembangunan sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Tjokroamidjojo (2000), ruang lingkup administrasi pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan rencana yang sistematis dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pengawasan pembangunan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi pembangunan merupakan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, untuk menentukan apakah tujuan pembangunan telah tercapai atau belum.

Administrasi pembangunan juga mencakup berbagai sektor pembangunan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan

budaya. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pembangunan politik bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan menjamin hak-hak asasi manusia. Pembangunan budaya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang positif, serta menghilangkan praktik-praktik budaya yang merugikan (Kuncoro, 2010).

Dalam pelaksanaan administrasi pembangunan, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam proses pembangunan. Swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi, dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi. Masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, dengan berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan (Suryono, 2010).

Administrasi pembangunan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability). Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Brundtland, 1987). Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pembangunan sosial harus memperhatikan keadilan dan kesetaraan, serta memberdayakan masyarakat. Pembangunan lingkungan harus menjaga kelestarian sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam era globalisasi saat ini, administrasi pembangunan juga harus memperhatikan aspek kerjasama internasional. Kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan konflik antar negara. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan (Kartasasmita, 2009).

Administrasi pembangunan juga harus adaptif terhadap perubahan zaman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan beraktivitas. Administrasi pembangunan harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, administrasi pembangunan

juga harus memperhatikan isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan bonus demografi (Mardikanto, 2010).

Dalam konteks Indonesia, administrasi pembangunan memiliki peran yang sangat penting. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan. Administrasi pembangunan di Indonesia harus mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Riyadi & Bratakusumah, 2004).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa prioritas pembangunan, seperti peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah ekonomi, dan pemantapan ketahanan nasional. Untuk mewujudkan prioritas-prioritas tersebut, diperlukan administrasi pembangunan yang efektif dan efisien, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan (Bappenas, 2019).

Dengan demikian, administrasi pembangunan merupakan cabang ilmu administrasi yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Administrasi pembangunan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Administrasi pembangunan juga harus adaptif terhadap perubahan zaman dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Dengan administrasi pembangunan yang efektif dan efisien, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

1.2 Sejarah Perkembangan Administrasi Pembangunan

1.2.1 Perkembangan Administrasi Pembangunan di Dunia

Administrasi pembangunan sebagai disiplin ilmu telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak kemunculannya. Awal mula administrasi pembangunan dapat ditelusuri kembali ke periode pasca Perang Dunia II, ketika banyak negara berkembang mulai memperoleh kemerdekaan dan berusaha untuk membangun ekonomi dan masyarakat mereka. Pada masa ini, para ahli administrasi publik dan ekonom pembangunan mulai melihat perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengelola pembangunan nasional (Riggs, 1970).

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori-teori pembangunan seperti teori modernisasi dan teori ketergantungan mulai berkembang. Teori modernisasi menekankan pada pentingnya industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, dan adopsi nilai-nilai dan praktik-praktik Barat untuk mencapai pembangunan. Di sisi lain, teori ketergantungan berpendapat bahwa keterbelakangan negara-negara berkembang disebabkan oleh eksploitasi oleh negara-negara maju melalui hubungan perdagangan yang tidak adil dan dominasi politik (Dos Santos, 1970).

Pada periode ini, administrasi pembangunan juga mulai dipengaruhi oleh pendekatan perencanaan terpusat yang populer di negara-negara sosialis. Pendekatan ini menekankan pada peran pemerintah dalam mengarahkan dan mengendalikan proses pembangunan melalui rencana pembangunan nasional yang komprehensif. Namun, pendekatan ini kemudian dikritik karena mengabaikan peran pasar dan masyarakat sipil dalam pembangunan (Waterston, 1965).

Pada tahun 1970-an, muncul pendekatan alternatif yang menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai "pembangunan partisipatif" atau "pembangunan berbasis masyarakat", menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal dan pemanfaatan pengetahuan dan sumber

daya lokal dalam proses pembangunan. Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial dalam pembangunan (Chambers, 1983).

Pada tahun 1980-an dan 1990-an, administrasi pembangunan mulai dipengaruhi oleh pendekatan neoliberal yang menekankan pada peran pasar dalam pembangunan. Pendekatan ini mempromosikan liberalisasi ekonomi, privatisasi, dan deregulasi sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pendekatan ini juga dikritik karena mengabaikan peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta mengatasi kegagalan pasar (Williamson, 1990).

Memasuki abad ke-21, administrasi pembangunan menghadapi tantangan-tantangan baru seperti globalisasi, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial ekonomi yang semakin meningkat. Pendekatan "tata kelola pemerintahan yang baik" (good governance) menjadi semakin populer sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (UNDP, 1997).

Selain itu, pendekatan pembangunan manusia (human development) juga semakin diterima sebagai alternatif

terhadap pendekatan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan (ul Haq, 1995)

1.2.2 Perkembangan Administrasi Pembangunan di Indonesia

Di Indonesia, administrasi pembangunan telah mengalami evolusi yang signifikan sejak kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, fokus utama pemerintah adalah pada pembangunan infrastruktur fisik dan industrialisasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Pada periode ini, pendekatan perencanaan terpusat dan intervensi pemerintah yang kuat dalam perekonomian menjadi ciri khas administrasi pembangunan di Indonesia (Hastangka et al., 2019).

Namun, pada tahun 1980-an dan 1990-an, Indonesia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pasar dalam pembangunan. Liberalisasi ekonomi, deregulasi, dan privatisasi menjadi kebijakan utama pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan menarik investasi asing. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan kritik karena dianggap

mengabaikan aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan (Wie, 2002).

Pasca krisis ekonomi 1997-1998, Indonesia mulai menerapkan reformasi administrasi pembangunan yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang baik, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di wilayahnya masing-masing. Selain itu, pendekatan pembangunan berbasis masyarakat juga semakin diadopsi untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan (Antlöv, 2003).

Saat ini, administrasi pembangunan di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan konteks global dan domestik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menekankan pada pentingnya pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah ekonomi, dan pemantapan ketahanan nasional sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, administrasi pembangunan di Indonesia perlu terus menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik, partisipasi masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan.

1.3 Peran Administrasi Publik dalam Pembangunan

Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara. Menurut Keban (2014), administrasi publik merupakan motor penggerak dalam perumusan kebijakan, implementasi program, dan evaluasi hasil pembangunan. Tanpa adanya administrasi publik yang efektif dan efisien, maka tujuan-tujuan pembangunan akan sulit untuk dicapai.

Salah satu peran utama administrasi publik dalam pembangunan adalah sebagai perencana dan pelaksana kebijakan publik. Administrasi publik bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial (Tjiptoherijanto, 2010). Dalam merumuskan kebijakan publik, administrasi publik harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti potensi sumber daya, kondisi sosial budaya masyarakat, dan dinamika politik yang berkembang.

Selain sebagai perencana dan pelaksana kebijakan, administrasi publik juga berperan dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur

keberhasilan pembangunan (Dwiyanto, 2015). Administrasi publik harus mampu menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan pelayanan publik yang berkualitas, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat dan partisipasi publik dalam pembangunan akan semakin tinggi.

Peran lain dari administrasi publik dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dalam membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Menurut Suryono (2010), pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Administrasi publik harus mampu memfasilitasi dan mendorong kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Di Indonesia, peran administrasi publik dalam pembangunan telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Pada masa Orde Baru, administrasi publik cenderung sentralistik dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (Wibawa, 2005). Namun, setelah reformasi 1998, administrasi publik di Indonesia mulai bergerak menuju desentralisasi dan demokratisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian direvisi menjadi UU No. 32

Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014) telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Salah satu contoh keberhasilan administrasi publik dalam mendorong pembangunan di Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan (Mubarak, 2010). PNPM Mandiri melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

1.4 Tantangan Administrasi Pembangunan di Era Globalisasi

Di era globalisasi saat ini, administrasi pembangunan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya persaingan global dalam menarik investasi dan sumber daya ekonomi. Menurut Kuncoro (2010), globalisasi telah mengubah lanskap persaingan ekonomi, di mana negara-negara berlomba-lomba untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor asing. Administrasi pembangunan harus mampu

merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan daya saing nasional dalam persaingan global tersebut.

Tantangan lain yang dihadapi administrasi pembangunan di era globalisasi adalah meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Globalisasi telah menciptakan peluang-peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan ketimpangan yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin (Stiglitz, 2002). Administrasi pembangunan harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan tersebut, seperti program pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan dasar, dan pemberdayaan kelompok marjinal.

Globalisasi juga menimbulkan tantangan bagi administrasi pembangunan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terkendali telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim (Keraf, 2010). Administrasi pembangunan harus mampu merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tantangan lainnya adalah meningkatnya tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di era globalisasi. Menurut Widodo (2001), globalisasi telah

meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Administrasi pembangunan harus mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Untuk dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut, administrasi pembangunan harus melakukan berbagai inovasi dan reformasi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembangunan. Pemanfaatan TIK dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pembangunan (Muluk, 2008). Selain itu, administrasi pembangunan juga harus mampu membangun kemitraan yang strategis dengan berbagai aktor pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Namun demikian, administrasi publik di Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan perannya dalam pembangunan. Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya tingkat korupsi dalam birokrasi pemerintahan (Transparansi Internasional Indonesia, 2020). Korupsi dapat menghambat efektivitas dan efisiensi administrasi publik dalam mengelola sumber daya pembangunan dan menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tantangan lainnya adalah masih rendahnya

kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara, khususnya di tingkat pemerintah daerah (Dwiyanto, 2015).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan reformasi administrasi publik yang komprehensif dan berkelanjutan. Reformasi tersebut harus diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme birokrasi pemerintahan (Prasojo & Kurniawan, 2008). Selain itu, juga diperlukan penguatan partisipasi publik dalam proses pembangunan, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, administrasi publik di Indonesia dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

BAB 2

TEORI DAN KONSEP PEMBANGUNAN



Gambar 2 Ilustrasi Teori dan Konsep Pembangunan

2.1 Teori Pembangunan Klasik dan Modern

Teori pembangunan telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Teori pembangunan klasik, yang muncul pada pertengahan abad ke-20, menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai kunci untuk mencapai pembangunan. Menurut Rostow (1960), pembangunan merupakan proses bertahap yang terdiri dari lima tahap, yaitu masyarakat

tradisional, pra-lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan konsumsi tinggi. Teori ini menekankan pada akumulasi modal dan industrialisasi sebagai syarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun, teori pembangunan klasik ini kemudian dikritik karena dianggap terlalu menyederhanakan proses pembangunan dan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Teori pembangunan modern, yang muncul pada 1970-an, berusaha untuk mengatasi kelemahan teori klasik dengan memasukkan aspek sosial dan lingkungan dalam proses pembangunan. Menurut Todaro & Smith (2012), pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensional yang meliputi perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan.

2.1.1 Teori Pembangunan Klasik: Rostow

Teori pembangunan klasik yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow (1960) dikenal sebagai teori tahapan pertumbuhan ekonomi. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi merupakan proses evolusioner yang terdiri dari lima tahapan, yaitu masyarakat tradisional, pra-lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan konsumsi tinggi. Teori ini menekankan bahwa setiap negara harus melalui kelima

tahapan tersebut secara berurutan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Asumsi dasar teori Rostow adalah bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kunci utama pembangunan dan bahwa setiap negara memiliki potensi untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat jika mampu memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti akumulasi modal dan industrialisasi. Rostow juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada tahap awal pembangunan. Contoh penerapan teori Rostow dapat dilihat pada negara-negara Asia Timur, seperti Korea Selatan dan Taiwan, yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui strategi industrialisasi berorientasi ekspor pada 1960-an dan 1970-an (Tran, 2016).

Contoh penerapan teori Rostow juga dapat dilihat pada pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih berada pada tahap masyarakat tradisional dengan ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian subsisten. Namun, sejak akhir 1960-an, pemerintah Indonesia mulai menerapkan strategi industrialisasi substitusi impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandai masuknya Indonesia ke tahap pra-lepas landas dalam teori Rostow. Pada 1980-an dan 1990-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dengan rata-

rata pertumbuhan di atas 7% per tahun (Wie, 2002). Periode ini dapat dianggap sebagai tahap lepas landas dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Selain itu, pengalaman pembangunan ekonomi Cina juga dapat dikaitkan dengan teori Rostow. Sebelum reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, Cina masih berada pada tahap masyarakat tradisional dengan ekonomi yang terpusat dan didominasi oleh sektor pertanian. Namun, sejak reformasi ekonomi dimulai, Cina telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dengan rata-rata pertumbuhan di atas 9% per tahun selama lebih dari tiga dekade (Zhu, 2012). Keberhasilan Cina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui reformasi pasar dan industrialisasi berorientasi ekspor dapat dianggap sebagai contoh negara yang berhasil melewati tahap lepas landas dan menuju kedewasaan dalam teori Rostow.

Namun, teori Rostow juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah bahwa teori ini cenderung mengabaikan faktor-faktor non-ekonomi, seperti institusi politik dan budaya, yang dapat mempengaruhi proses pembangunan ekonomi. Selain itu, pengalaman pembangunan ekonomi beberapa negara, seperti Jepang dan negara-negara Eropa Barat, menunjukkan bahwa tahapan pembangunan ekonomi tidak selalu terjadi secara linier seperti yang digambarkan oleh Rostow (Ohno, 2009). Meskipun demikian,

teori Rostow tetap menjadi salah satu teori pembangunan ekonomi yang paling berpengaruh dan sering dijadikan acuan dalam memahami proses pembangunan ekonomi di berbagai negara.

2.1.2 Teori Pembangunan Modern: Harrod-Domar

Teori pembangunan modern Harrod-Domar, yang dikembangkan oleh (Boianovsky, 2017) Roy Harrod (1939) dan Evsey Domar (1946), berfokus pada peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh rasio tabungan dan rasio modal-output. Semakin tinggi tingkat tabungan dan semakin efisien penggunaan modal, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai.

Asumsi utama teori Harrod-Domar adalah bahwa perekonomian berada dalam kondisi full employment dan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya investasi yang cukup untuk mengimbangi depresiasi modal dan pertumbuhan angkatan kerja. Teori ini menekankan pentingnya akumulasi modal melalui peningkatan tabungan dan investasi sebagai kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh penerapan teori Harrod-Domar dapat dilihat pada strategi pembangunan yang diadopsi oleh banyak negara berkembang pada 1950-an dan 1960-an, yang berfokus pada industrialisasi dan investasi infrastruktur berskala besar (Boianovsky, 2017).

Salah satu contoh penerapan teori Harrod-Domar adalah pengalaman pembangunan ekonomi Uni Soviet pada era pasca Perang Dunia II. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Uni Soviet menerapkan kebijakan perencanaan terpusat yang berfokus pada akumulasi modal melalui investasi besar-besaran di sektor industri berat, seperti baja, mesin, dan energi. Strategi ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat pada 1950-an dan 1960-an, dengan rata-rata pertumbuhan PDB mencapai 5,7% per tahun (Boianovsky, 2017). Namun, pendekatan ini juga menimbulkan berbagai masalah, seperti inefisiensi, rendahnya kualitas produk, dan kurangnya inovasi teknologi.

Penerapan teori Harrod-Domar juga dapat dilihat pada pengalaman pembangunan ekonomi India setelah kemerdekaan. Pada 1950-an dan 1960-an, pemerintah India menerapkan strategi industrialisasi substitusi impor yang berfokus pada investasi di sektor industri berat dan infrastruktur. Kebijakan ini didukung oleh perencanaan terpusat dan kontrol ketat terhadap perekonomian. Meskipun strategi ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan yang dicapai masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Taiwan (Boianovsky, 2017). Hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya efisiensi investasi dan kurangnya penekanan pada pengembangan sektor ekspor.

Teori Harrod-Domar juga mempengaruhi strategi pembangunan yang diadopsi oleh banyak negara Afrika setelah memperoleh kemerdekaan pada 1960-an. Negara-negara seperti Ghana, Nigeria, dan Tanzania menerapkan kebijakan industrialisasi yang berfokus pada investasi di sektor industri berat dan infrastruktur, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, strategi ini sering kali kurang berhasil karena berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil, rendahnya permintaan domestik, dan ketergantungan yang tinggi pada ekspor komoditas primer (Boianovsky, 2017). Akibatnya, banyak negara Afrika mengalami stagnasi ekonomi dan krisis utang pada 1980-an dan 1990-an, yang menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pendekatan pembangunan yang berfokus pada akumulasi modal ala Harrod-Domar.

2.1.3 Teori Pembangunan Modern: Solow

Teori pembangunan modern yang dikembangkan oleh Robert Solow (1956) menekankan peran kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada akumulasi modal dan pertumbuhan angkatan kerja, tetapi juga pada peningkatan produktivitas yang dihasilkan dari kemajuan teknologi. Teori Solow juga

memperkenalkan konsep "*steady-state growth*," di mana perekonomian tumbuh pada tingkat yang stabil dan berkelanjutan.

Asumsi penting dalam teori Solow adalah bahwa kemajuan teknologi bersifat eksogen, yang berarti bahwa kemajuan teknologi terjadi secara independen dari keputusan ekonomi yang diambil oleh agen-agen ekonomi. Teori ini juga mengasumsikan adanya diminishing returns pada faktor-faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja. Contoh penerapan teori Solow dapat dilihat pada strategi pembangunan yang diadopsi oleh banyak negara maju, yang berfokus pada investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan produktivitas (Fernald & Jones, 2014).

Salah satu contoh penerapan teori Solow adalah pengalaman pembangunan ekonomi Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Pada periode ini, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dengan rata-rata pertumbuhan PDB mencapai 4,1% per tahun antara 1948 dan 1973 (Fernald & Jones, 2014). Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), peningkatan kualitas pendidikan, dan adopsi teknologi baru seperti komputer dan robotika. Hal ini sejalan dengan penekanan teori Solow pada peran kemajuan